



Strategies for addressing stunting from normative aspects to the four T's campaign in Bone Regency

Strategi Penanganan Stunting Dari Aspek Normatif Hingga Kampanye Empat T di Kabupaten Bone

Illya Tul Uyuni^{a,1,*}, Marjana Fahri^{b,2}

^a IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

^b IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ illyatuluyuni@gmail.com; ² marjana_fahri@yahoo.com

* illyatuluyuni@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords

Bone;

Pemerintah Daerah;

Stunting;

Stunting is a health problem requiring special attention from the Bone Regency Government. Using empirical legal research, this study shows that the Bone Regency Government has adopted several strategies to reduce stunting rates, including issuing and enacting Regent Regulation No. 3 of 2020 as a solid basis for legitimacy and a normative framework for regional stakeholders to address stunting. In addition to the normative framework, massive efforts are being made on the ground, such as (i) the 4 T campaign program, (ii) distribution of blood-boosting tablets, (iii) improvement and attention to maternal health conditions during the 1000 days before birth; (iv) support in the form of supplementary feeding for pregnant women; (v) education related to stunting; (vi) child growth monitoring programs. These programs have impacted the year-on-year decline in stunting rates in Bone Regency.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Permasalahan stunting yang terjadi di Indonesia cukup tinggi. Ditandai dengan banyaknya anak yang mengalami kekurangan asupan gizi, malnutrisi kronis, dan penyakit berulang selama anak-anak yang berdampak negatif pada kualitas hidup anak di masa depan. Stunting merupakan permasalahan gizi kronis sebab kurangnya asupan gizi dalam

rentang waktu yang cukup lama, yang umumnya hal ini dipicu oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting bisa berawal dari anak ketika masih dalam kandungan dan baru akan nampak ketika anak sudah berusia dua tahun.¹ Kondisi ini menyimpang dari prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui dan ditegaskan oleh bangsa Indonesia sendiri melalui konstitusinya (UUD 1945), yakni prinsip yang mengaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²³

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan angka stunting yang terbilang tinggi. Terjadinya stunting di Kabupaten Bone dipicu oleh beberapa faktor diantaranya faktor pola asuh yang salah, faktor kemiskinan⁴, faktor kurangnya pemahaman masyarakat terkait stunting, faktor kurangnya pemberdayaan perempuan dan faktor degradasi lingkungan.⁵ Sudah menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan penyelamatan terhadap generasi yang akan datang dengan aksi dari berbagai pihak dalam penurunan angka stunting.

Persentase prevalensi balita stunting di Kabupaten Bone mengalami kenaikan pada tahun 2019. Berdasarkan hasil peninjauan Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 Balita Stunting di Kabupaten Bone tercatat sebesar 34,1 persen dari sebelumnya 33 persen. Pengukuran perkembangan Balita Stunting dari e-PPGBM pada periode Februari - Agustus 2021 meningkat dari 5,19 persen menjadi 6,17 persen. Pada periode Februari - Agustus 2022 kembali mengalami kenaikan melonjak dari 6,19 persen menjadi 6,7 persen atau 2.708 Balita.⁶ Lebih rinci jika terlihat dari penyebarannya, prevalensi Balita Stunting di

¹Kemntrian Kesehatan, "Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, dan Kejadian", dalam web <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>, diakses 5 Januari 2023.

² Hamzah, H., Amir, I., Hasanuddin, S., Tarmizi, T., & Syarif, M. F. (2023). Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of Siyāsah and Fiqh al-Bi'ah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 367-380.

³Lihat Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Rahmaniar, A., Amir, I., Keri, I., Ilmiyati, I., Zubair, A., & Rosita, R. (2022). Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur. *Constitutional Law Review*, 1(2), 78-91. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3995>

⁵ Ulang, A., & Amir, I. (2022). Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone. *Constitutional Law Review*, 1(1), 28-38. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550>

⁶Kasdar Kasau, "Angka Stunting di Bone urutan Keempat Tertinggi di Sul-Sel", dalam web <https://makassar.tribunnews.com/2>, diakses 7 desember 2023.

Kabupaten Bone lebih diprioritaskan di Kecamatan Sibulue yang menduduki posisi tertinggi sebesar 496 Balita, Tellu limpoe sebesar 306 Balita, Ajangale 255 Balita, Tanete Riattang sebesar 236 Balita dan Mare sebesar 230 Balita.⁷

Pencegahan dan penurunan angka stunting membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan integral. Percepatan penurunan Angka stunting diatur dalam Perpres/No.72/2021 tentang penurunan angka stunting untuk mencapai kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas manusia, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif dibutuhkan status gizi yang optimal melalui perbaikan gizi secara teratur. Upaya peningkatan kualitas melalui koordinasi dan sinkronisasi baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan daerah serta instansi lainnya.

2. Metode Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang menghasilkan data primer dari lapangan secara langsung baik itu dari responden atau informan. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, sehingga data yang didapat lebih akurat dan sesuai dengan realitas. Dengan pendekatan *deskriptif-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan *yuridis empiris* dengan cara meneliti pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tentang Peran Pemerintah Desa Dan Kelurahan Dalam Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Daerah Kabupaten Bone dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan stunting.

3. Pembahasan

3.1. Strategi Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Bone

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bone, Mursakin menuturkan angka stunting di Bone masih tinggi. Kendati demikian, Pemerintah

⁷Idhul Abdullah, "Prevalensi Stunting di Bone Melonjak, Sibulue Posisi Tertinggi", dalam web <https://bonesatu.com/index.php/2022>, diakses 5 Januari 2023.

Kabupaten Bone terus melakukan upaya agar angka stunting di Bone terus diturunkan. Pada tahun 2021 angka stunting sebesar 34,1 persen, angka tersebut turun menjadi 27,8 persen pada tahun 2022, pada tahun 2023 angka tersebut ditargetkan turun lagi sebesar 7,3 persen.⁸ Diperlukan kolaborasi dari seluruh unsur pemerintahan dalam mewujudkan penurunan angka stunting, mulai dari pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.⁹

Bapak Awaluddin selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone menuturkan upaya yang dilakukan menurunkan angka stunting dengan memperhatikan kepastian hukum agar desa memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan peran dan kewenangan mereka dalam intervensi gizi terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menghindari umpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kader gizi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi.¹⁰ Mereka bertugas untuk memberikan edukasi gizi kepada masyarakat, serta memantau dan mendampingi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Bone lebih terkonsentrasi pada 5 (Lima) Kecamatan. Kecamatan Sibulue yang menduduki posisi tertinggi sebesar 496 Balita, Tellu Limpoe sebesar 306, Ajangale 255 Balita, Tanete Riattang sebesar 236 Balita, dan Mare sebesar 230 Balita.

Bentuk strategi Pemerintah Daerah dalam menekan stunting *Pertama*, Merealisasikan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Daerah Kabupaten Bone. Direalisasikan oleh pihak kesehatan dengan tujuan mencegah dan menurunkan angka stunting melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak balita.

Kedua, kampanye Empat Terlalu yaitu Terlalu Muda usia saat melahirkan, Terlalu Tua usia saat melahirkan, Terlalu Sering atau terlalu banyak anak dilahirkan dan Terlalu Dekat Jarak melahirkan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka stunting,

⁸Bone.go.id, “Upaya Pemkab Bone Turunkan Angka Stunting Setiap Tahun”, dalam web <https://bone.go.id/>, diakses 1 Desember 2023.

⁹ Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.

¹⁰Bone.go.id, “Upaya Cegah dan Turunkan Stunting, Pemkab Gelar Aksi 4 dan 5 Pencegahan Stunting di Bone”, dalam web, diakses 5 Januari 2023.

yang pada tahun 2022 mencapai 27,8 persen dari total populasi anak di Kabupaten Bone. Yang kemudian ditargetkan pemerintah turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.¹¹

Ketiga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana program yang dijalankan diantaranya, penyebaran obat tablet tambah darah, sosialisasi dan training pencegahan stunting, Program dahsyat dapur sehat atasi stunting, dan lokasi pelaksanaan program hampir di semua Kecamatan Kabupaten Bone utamanya kecamatan yg terindikasi lebih jumlah angka anak yang terkena stunting.

Keempat, memperbaiki dan memperhatikan kondisi kesehatan ibu selama 1000 hari sebelum kelahiran anak sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting. Dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan perawatan kesehatan yang baik, dapat membantu menjamin pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi janin. Jadi perlu untuk dilakukan pemeriksaan setiap bulannya di Puskesmas/Poskesdes terdekat.

Kelima, memberikan bantuan berupa makanan tambahan gizi masyarakat seperti susu, gula, minyak, bubur kacang hijau dan komponen makanan tinggi protein lainnya.

Keenam, memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan stunting dengan melakukan pertemuan setiap bulannya. Untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola makan sehat, perawatan anak, dan praktik gizi yang baik. Orang tua diberi informasi untuk membantu meningkatkan kesehatan anak mereka. Karena masih banyak orang tua yang tabu akan stunting sehingga tidak mengetahui jika anaknya terkena stunting

Ketujuh, melakukan program pemantauan pertumbuhan anak, upaya sistematis untuk melacak dan menilai perkembangan fisik dan kesehatan anak secara teratur. Tujuannya adalah mendeteksi dini potensi masalah kesehatan, termasuk stunting. Program ini biasanya melibatkan beberapa komponen, seperti:

1. Pemeriksaan Rutin: Anak-anak menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga pertumbuhan mereka. Mulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala dan parameter fisik lainnya.
2. Pencatatan Data: Data hasil pengukuran yang dicatat dan dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan

¹¹Bone.go.id, “Upaya Pemkab Bone Turunkan Angka Stunting Setiap Tahun”, dalam web <https://bone.go.id/>, diakses 1 Desember 2023.

mengidentifikasi potensi masalah pertumbuhan atau perkembangan secara dini.

3. Intervensi Dini: Jika ada indikasi masalah pertumbuhan atau gizi, program ini memungkinkan untuk intervensi dini. Ini bisa melibatkan saran gizi, pemberian suplemen, atau rujukan ke layanan kesehatan lebih lanjut.
4. Kolaborasi dengan Pusat Kesehatan: Program ini sering kali bekerja sama dengan pusat kesehatan setempat untuk memastikan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat diidentifikasi dan mendapatkan perawatan yang sesuai.

Strategi dan program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Bone.¹²

3.2. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Dalam Menurunkan Angka Stunting

Strategi dan program yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak positif bagi masyarakat antara lain :

1. Peningkatan kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh ibu dan anak. Karena dengan adanya peningkatan dalam pemberian akses kesehatan dan kualitas layanan pada masyarakat khususnya ibu dan anak, seperti pemberian imunisasi, konseling gizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin maka akan mencegah anak terkena stunting. Anak yang tidak stunting memiliki sistem imun yang lebih kuat, sehingga lebih tahan terhadap penyakit.
2. Peningkatan prestasi akademik dan produktivitas anak. Anak yang tidak stunting memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, sehingga lebih mudah belajar dan berprestasi di sekolah.
3. Peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan keluarga. Anak yang tidak stunting memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan berpenghasilan tinggi.

¹² Kesmas Kemkes, "*Cegah Stunting Itu Penting*", dalam web <https://kesmas.kemkes.go.id>, diakses 28 November 2023.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa. Anak yang sehat, cerdas, dan produktif akan memberikan dampak positif sebagai generasi penerus. Sehingga, dengan tidak adanya stunting pada anak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Rifka Andika Putri menuturkan antusias masyarakat terhadap pemberian bantuan makanan tambahan untuk meningkatkan akses dan konsumsi pangan bergizi, termasuk penyediaan pangan lokal yang bergizi dari pemerintah. Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting memiliki dampak positif yang luas, baik bagi anak-anak yang terkena stunting, keluarga mereka, maupun masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Disamping itu, program-program tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat yang awalnya tabu akan stunting menjadi lebih paham dan mampu mencegah stunting pada generasi mendatang.¹³

Beberapa daerah di Kabupaten Bone yang menjadi prioritas penanganan stunting juga sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 berada pada angka 34,1 persen, kemudian turun menjadi 27,8 persen pada tahun 2022, kemudian ditargetkan turun 7,3 persen pada tahun 2023. Kabupaten Bone salah satu daerah yang berhasil dalam pencegahan dan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang direalisasikan oleh pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone telah menunjukkan hasil yang positif. Meski demikian pemerintah Kabupaten Bone tidak akan berhenti melindungi kesehatan warganya sampai benar-benar masalah stunting ini bebas di Bumi Arung Palakka.¹⁴

Terlepas dari itu, beberapa strategi dan program yang direncanakan oleh pemerintah akan terealisasikan dengan baik jika antara masyarakat dan pemerintah terjalin kerja sama yang holistik. Karena masyarakat dan pemerintah itu saling terkait satu sama lain. Masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan dapat memberikan informasi yang berharga kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah memiliki sumber daya dan kebijakan yang dapat mendukung program-program kesehatan

¹³Rifka Andika Putri, selaku tenaga kesehatan, Wawancara Toro, 2 Desember 2023.

¹⁴Bone.go.id, "Pemda Bone Tetapkan 50 desa Lokasi Prioritas Penanganan Stunting", dalam web <https://bone.go.id>, diakses 7 Desember 2023.

dan gizi. Kolaborasi ini memungkinkan terlaksananya program yang lebih efektif dan menyeluruh untuk mencegah dan menurunkan angka stunting dalam suatu daerah.

4. Penutup

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka stunting direalisasikan melalui pelaksanaan program-program percepatan penurunan angka stunting sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Daerah Kabupaten Bone, program kampanye 4 (empat) T, Penyebaran obat tablet tambah darah, memperbaiki dan memperhatikan kondisi kesehatan ibu selama 1000 hari sebelum kelahiran, pendidikan terkait stunting, dan program pemantauan pertumbuhan anak. Dengan adanya beberapa strategi dan program tersebut memberikan dampak yang positif yang luas bagi masyarakat, beberapa daerah di Kabupaten Bone yang menjadi prioritas penanganan stunting juga sudah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dari program dan strategi pemerintah Kabupaten Bone tersebut terbilang relevan dan efektif.

References

- Ahmad Arif, “Stunting Bukan Hanya Soal Gizi, melainkan Juga Pencemaran Lingkungan”, dalam web <https://www.kompas.id/>, diakses 7 Desember 2023.
- Bone.go.id, “Pemda Bone Tetapkan 50 desa Lokasi Prioritas Penanganan Stunting”, dalam web <https://bone.go.id>, diakses 7 Desember 2023.
- Bone.go.id, “Upaya Pemkab Bone Turunkan Angka Stunting Setiap Tahun”, dalam web <https://bone.go.id/>, diakses 1 Desember 2023.
- BPK RI, “Profil Kabupaten Bone”, dalam web <https://sulsel.bpk.go.id/>, diakses 1 Desember 2023.
- Dewi Ayu Puspaningrum, “Model Prediksi Stunting Pada Balita Berbasis Variabel Maternal, Status Gizi, Sosiodemografi, Dan Sanitasi Lingkungan”, dalam web <https://digilib.unila.ac.id/> diakses 2 Desember 2023.
- Dinas Kesehatan, “Tentang Dinkes”, dalam web <https://dinkes.bone.go.id>, diakses 28 Desember 2023.

- Helmyati, Siti. dkk. *Stunting: Permasalahan dan Tantangannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020.
- Hamzah, H., Amir, I., Hasanuddin, S., Tarmizi, T., & Syarif, M. F. (2023). Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of Siyāsah and Fiqh al-Bi'ah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 367-380.
- Kasdar Kasau, "Angka Stunting di Bone urutan Keempat Tertinggi di Sul-Sel", dalam web <https://makassar.tribunnews.com/2>, diakses 7 desember 2023.
- Kesmas Kemkes, "Cegah Stunting Itu Penting", dalam web <https://kesmas.kemkes.go.id>, diakses 28 November 2023.
- Lelih Herawati, "Pengaruh Kemiskinan Eskstrem terhadap Angka Kejadian Stunting di Provinsi Banten", dalam web <https://bappeda.bantenprov.go.id/>, diakses 7 Desember 2023.
- Nur Azizah, dkk. "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Buton Selatan", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, Mei 2022.
- Normaisa, dkk. "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di P2PTM, "Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi", dalam web <https://p2ptm.kemkes.go.id/>, diakses 29 November 2023.
- Rahmaniar, A., Amir, I., Keri, I., Ilmiyati, I., Zubair, A., & Rosita, R. (2022). Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur. *Constitutional Law Review*, 1(2), 78-91. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3995>
- Rini Archda Saputri, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019.
- Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.
- Ulung, A., & Amir, I. (2022). Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone. *Constitutional Law Review*, 1(1), 28-38. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550>

Yuliana, Wahida dan Nul Hakim, Bawon. *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*.

Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia: Takalar. 2019.

Wikipedia, “*Kebijakan Kesehatan*”, dalam web <https://id.wikipedia.org/>, diakses 29 November 2023.

Republik Indonesia, R.I. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, R.I. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Republik Indonesia, R.I. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Republik Indonesia, R.I. Peraturan Bupati Nomor 3 Tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Daerah Kabupaten Bone

WAWANCARA

Rifka Andika Putri, selaku tenaga kesehatan, *Wawancara Toro 2 Desember 2023*.

Rahmawati, selaku masyarakat, *Wawancara Toro 2 Desember 2023*.